

**SANKSI PIDANA AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT
MAQĀSID AS-SYARI'AH
(ANALISIS UU RI. NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 015 SJ	No. REG. : S-2011 / SJ / 015 ASAL BUKU : Oleh : TANGGAL :

M. Zahir Mashuri
NIM: C33205007

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahir Mashuri/NIM. C33205007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2011
Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 19707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahir Mashuri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 19707271996031002

Sekretaris,

Wahid/Hadi Purnomo, MH.
NIP. /197410252006041002

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Nur Lailatul Misyafa'ah, LC. M. Ag.
NIP. 197904162006042002

Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 19707271996031002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A
NIP. 1950

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NTP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Bibliographic Research*) yang dilengkapi dengan data dari instansi terkait dengan judul “*Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqāsid as-Syarī’ah (Analisis Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut analisis UU RI No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut *Maqāsid as-Syarī’ah*.

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data keseluruhan yang diperoleh dan dihimpun melalui studi kualitatif, pembacaan dan kajian kepustakaan (*text reading*) serta dilengkapi juga dengan data dari instansi-instansi terkait, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analisis verifikatif.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan antara lain: *pertama*, hukuman atau sanksi pidana yang diberikan dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang berupa hukuman penjara dan denda, mulai dari penjara 3 tahun sampai dengan 15 tahun bagi yang melakukan dengan sengaja dan denda mulai dari Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Dan penjara mulai dari 1 tahun sampai dengan 9 tahun serta denda mulai dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) yang diperuntukkan bagi orang yang dengan kelalaiannya telah melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan. Dari beberapa bentuk hukuman tersebut sudah sepantasnya diberikan kepada pelakunya karena mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dan pentingnya fungsi lingkungan hidup air sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. *Kedua*, Menurut *Maqāsid as-Syari'ah*, pemberlakuan sanksi akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat sehingga tercapainya unsur *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) yang menjadi salah satu pokok tujuan umum syari'at Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya penerapan sanksi terhadap kegiatan industri yang dapat menyebabkan pencemaran air yang diberikan oleh pemerintah dapat ditegakkan dan menjadikan fungsi dari lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II SANKSI PIDANA MENURUT *MAQASID AL-SYARI'AH*

A. Sanksi Pidana.....	23
1. Pengertian sanksi pidana	23
2. Tujuan sanksi pidana	24

**BAB IV ANALISIS *MAQAŞID AS-SYARI'AH* TERHADAP SANKSI
PIDANA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP
AIR SUNGAI MENURUT UU RI NO. 32 TH. 2009
TENTANG PPLH**

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut UU RI No. 32 Th. 2009 Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai	64
B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memanjang dari Barat ke Timur dengan panjang ± 5.140 kilometer dan lebar dari Utara ke Selatan ± 1.949 kilometer. Secara astronomi, Indonesia terletak antara $06^{\circ} 16' 20''$ LU sampai $11^{\circ} 16' 00''$ LS dan $94^{\circ} 46' 00''$ BB- $141^{\circ} 00' 00''$ BT dengan luas $17.027.087$ kilometer persegi dengan garis pantai ± 80.791 kilometer dan luas wilayah perairan $\pm 3.166.163$ kilometer persegi.

Disamping itu negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mengenai “kemakmuran” tersebut, penjelasan resmi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 memuat, antara lain sebagai berikut:

“Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis besar haluan negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.

km² dan pemilikan lahan per keluarga rata-rata kurang dari 0,25 ha, jumlah buruh tani lebih besar dari 30%, dan produksi pertanian lahan kering antara 0,5-1,0 ton per ha, menunjukkan suatu gambaran umum yang secara sosial ekonomi juga termasuk “kritis”. Keadaan tersebut menjadi pemicu meluasnya degradasi dalam bentuk besarnya laju erosi di daerah tersebut yang mencapai antara 6-10 mm/tahun.

Besarnya potensi sumberdaya air di sungai Citarum telah ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya industri di wilayah hulu dan tengah DAS Citarum. Di bagian hulu Citarum (radius 75 km dari Bandung) telah dibuat 2 bendungan besar, Saguling dan Cirata yang selain berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik juga sebagai pemasok air bagi kelangsungan industri di daerah tersebut. Dengan laju sedimentasi yang tinggi, air sungai Citarum dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi pengembangan usaha di daerah hilir yang berkaitan dengan pemanfaatan air dengan kualitas tertentu.³

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable environmental management*) mempunyai dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Dimensi ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan dan efisiensi dalam manfaat sumberdaya alam harus diupayakan secara terus menerus. Dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi kekayaan/pemerataan secara adil serta penghapusan kemiskinan. Dimensi ekologi lebih menekankan pada

³ *Ibid.*, h. 23.

Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan dampak pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya perkembangan industri yang menjadi faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa adanya akibat buruk yang ditimbulkan.

Undang-Undang No. 32 Th. 2009 pasal 1 ayat 2 menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum". Pasal 1 ayat 5 menyatakan: "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup". Pasal 1 ayat 14 juga menyatakan: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Dalam UU No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan beberapa sanksi pidana bagi pelanggaran pencemaran yang sebagian tercantum dalam pasal 98 ayat 1 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kerusakan baku mutu lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

⁴ *Ibid.*, h. 20.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini yang penulis ketahui tentang pembahasan yang sama persis dengan yang penulis bahas memang belum pernah ada, namun penulis juga mendapatkan judul tentang:

1. “Penerapan Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Dan Menaggulangi Pencemaran Air Sungai Akibat Industri di Jawa Timur” dari Universitas Dr. Soetomo tahun 2006 ditulis oleh saudara Imam Bushori. Substansi pembahasan tersebut adalah bagaimana keefektifan undang-undang lingkungan hidup dalam memberikan sanksi administratif terhadap pihak industri yang telah melakukan pencemaran air sungai di kawasan Jawa Timur berdasarkan data-data pelanggaran dan upaya penegak hukum dalam menjalankan undang-undang yang sudah dibuat.
2. Karya ilmiah dari Dedi Harianto tahun 2003 salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Lingkungan” (Studi Kasus Pencemaran Sungai Belumai) dari penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan mengenai efektifitas peraturan pemerintah yang berupa Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan persengketaan gugatan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh masyarakat dan badan hukum sehingga akan terciptanya kesejahteraan serta dapat mengembalikan fungsi awal dari lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan manusia.

diberikan kepada industri yang dimungkinkan untuk melakukan pencemaran di bantaran Kali Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer (utama).

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi adalah perundang-undangan di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 02 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*.
5. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*.
6. Abdul Qodir al-Audah, *Criminal Law of Islam*.
7. Kasus pencemaran industri terhadap air Kali Surabaya di Surabaya tahun 2009-2010.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam Bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama yaitu sanksi pidana yang mencakup tentang pengertian, tujuan, unsur-unsur, asas-asas, bentuk dan pelaksanaan sanksi pidana, kedua yaitu konsep *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang meliputi pengertian, sejarah perkembangan, tujuan, pembagian dan relasi *Maqāṣid as-Syarī'ah* dengan sanksi pidana.

Bab ketiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai menurut UU RI No. 32 Th. 2009 PPLH. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: pertama mengenai Pencemaran industri terhadap air sungai meliputi pengertian, macam-macam, akibat dan dampak pencemaran industri, kedua membahas tentang pencemaran industri terhadap air di Kali Surabaya yang meliputi pencemaran industri yang dikenakan sanksi pidana menurut UU No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan

Bab empat menguraikan tentang analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap sanksi pidana pencemaran industri terhadap air sungai. Terdiri dari dua sub bab, yaitu: analisis terhadap sanksi pidana menurut UU RI No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan analisis terhadap sanksi pidana menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah* mengenai pencemaran industri terhadap air sungai.

Bab lima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*.³

3. Unsur-unsur sanksi pidana

Hak asasi manusia menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM, mengingat ancaman yang keras mengandung hikmah yang sangat besar, terpenting bagi si pelaku pidana hukuman tersebut. Hukuman merupakan bentuk penyadaran bahwa tindakan yang sudah dilakukan merupakan kesalahan maupun kekeliruan yang harus dibenarkan.

Pasal 5 dari *Universal Declaration of Human Rights* bertujuan menghindari perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.18-19.

- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman qishas yang dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukum pelengkap ini menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok jarimah *hudud* dan *qisas/diyat*.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terdakwa akan dipenjarakan atau didera (*jild*), mengenai penjara pun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

Keempat, di tinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman,

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A.

Pendapat kedua adalah menurut versi Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam hal ini terbagi ke dalam dua fase besar antara sebelum dan sesudah Ibnu Taimiyyah. Pasca Ibnu Taimiyyah kemudian dikenal tokoh-tokoh lanjutannya seperti Imam Ghazali, Ibnu Abdissalam, Najmuddin at-Tūfi, dan Imam al-Syaṭibi. Pada level selanjutnya hingga dewasa ini, maka Imam al-Syaṭibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai Bapak *Maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai tokoh peletak dasar ilmu *Maqāṣid* sistemik dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat*.¹⁶

3. Tujuan *maqāsid as-syarī'ah*

Hukum Islam dibuat tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini juga mengemukakan bahwa tujuan yang hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan untuk kemaslahatan.

¹⁶ <http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/maqashid-al-syariah.html>, Posting tanggal 10 Desember 2010, pkl. 17.50

c) Partikel SO₂ dan NO₂. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan.

d) Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih.

ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun (*toxic*) sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia.⁹

yang ditentukan untuk ekosistem pariwisata berbeda dengan ekosistem perairan sungai, karena disini sangat berbeda corak ekosistem dan sifat peruntukannya.¹¹

Untuk menentukan apakah lingkungan hidup telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan, tentu harus ditetapkan kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukurnya. Penentuan tentang telah terjadinya pencemaran atau kerusakan, menggunakan kriteria yang bersifat ilmiah dan kriteria Baku Mutu Lingkungan. Dengan demikian, kriteria yang harus kita gunakan ialah data dan informasi yang bersifat ilmiah, landasan sarana hukum yang menentukan terminologi pencemaran dan kerusakan dan ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan. Jadi, pencemaran atau kerusakan tidak dapat ditentukan dengan hanya memperhatikan faktor fisiknya saja, dengan perkataan lain untuk menentukan telah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diperlukan kriteria yang jelas dan pasti diantaranya ialah:

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.279.

[illegible]

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
FISIKA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dalam keadaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/liter	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg/liter	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional residu tersuspensi ≤ 5000
KIMIA ANORGANIK						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiahnya
BOD	mg/liter	2	3	6	12	
COD	mg/liter	10	25	50	100	
DO	mg/liter	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg.	mg/liter	0.2	0.2	1	5	
NO ₃ sbg. N	mg/liter	10	10	20	20	
NH ₃ – N	mg/liter	0.5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,002 mg/liter sebagai NH ₃
Arsen	mg/liter	0.05	1	1	1	
Kobalt	mg/liter	0.2	0.2	0.2	0.2	

Barium	mg/liter	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/liter	1	1	1	1	
Selenium	mg/liter	0.01	0.05	0.05	0.05	
Kadmium	mg/liter	0.01	0.01	0.01	0.01	
Khrom (VI)	mg/liter	0.05	0.05	0.05	1	
Tembaga	mg/liter	0.02	0.02	0.02	0.2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Cu < 1 mg/liter
Besi	mg/liter	0.3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Fe < 5 mg/liter
Timbal	mg/liter	0.03	0.03	0.03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Pb < 0,1 mg/liter
Mangan	mg/liter	0.1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/liter	0.001	0.002	0.002	0.005	
Seng	mg/liter	0.05	0.05	0.05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/liter
Khlorida	mg/liter	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/liter	0.02	0.02	0.02	(-)	
Fluorida	mg/liter	0.5	1.5	1.5	(-)	
Nitrit sbg. N	mg/liter	0.05	0.05	0.05	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N < 1 mg/liter
Sulfat	mg/liter	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/liter	0.03	0.03	0.03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sbg. H ₂ S	mg/liter	0.002	0.002	0.002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0.1

MIKROBIOLOG						
- Faecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000
- Total Coliform	Jml/100	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIFIT						
- Gross-A	Bq/liter	0.1	0.1	0.1	0.1	
- Gross-B	Bq/liter	1	1	1	1	
KIMIA						
Minyak dan lemak	µg/liter	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	µg /liter	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sbg. Fenol	µg /liter	1	1	1	(-)	
BHC	µg /liter	210	210	210	(-)	
Adrin dan	µg /liter	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	µg /liter	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	µg /liter	2	2	2	2	
Heptachlor dan Heptachlor	µg /liter	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg/liter	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	µg /liter	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg /liter	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg /liter	5	(-)	(-)	(-)	

K e t e r a n g a n :

mg	:	Milligram
µg	:	Mikrogram
ml	:	Milliliter
bq	:	Bequerel
MBAS	:	Methylene Blue Active Substance

- Logam berat merupakan logam terlarut
- Nilai di atas merupakan nilai maksimum, kecuali untuk pH dan DO
- Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum
- Nilai DO merupakan batas minimum
- Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

**ANALISIS *MAQAŞID AS-SYARI'AH* TERHADAP SANKSI
PIDANA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR
SUNGAI MENURUT UU RI NO. 32 TH. 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Tujuan dari adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam pasal 3 yaitu:

- 64

B. Saran

Banyaknya kegiatan perindustrian yang menyebabkan pencemaran terhadap air sungai disebabkan beberapa faktor yang salah satunya kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari pemilik industri mengenai fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang pada akhirnya berakibat pula terhadap sulitnya upaya penegakan hukumnya. Maka penulis memberikan saran terhadap pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya pelaku industri mengenai sangat pentingnya fungsi lingkungan hidup air sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asdak, Chay. dan Oekan S. Abdullah, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Lingkungan dan Pembangunan) volume 20 no. 1*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- 'Audah, Abd. Al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Karachi: International Islam Publisher, 1987.
- _____. *Criminal Law Of Islam*, Karachi: International Islam Publisher, 1987.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lampiran Berita Acara Pengawasan Dalam Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Oleh Perum Jasa Tirta I dan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.
- Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
- Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Kerjasama Perum Jasa Tirta I Dengan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

<http://www.pdfchaser.com/LIMBAH-B3-DAN-KESEHATAN.html#>, posting tanggal 12 Januari 2011.